
DINAMIKA IDENTITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK: TINJAUAN DARI ASPEK POLITIK

Asin Elisabet Br. Barus

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk merupakan topik yang menarik dalam kajian politik kontemporer. Identitas sosial yang beragam dalam masyarakat menciptakan tantangan dan peluang dalam konteks politik. Artikel ini mengeksplorasi peran identitas sosial dalam politik masyarakat majemuk dengan fokus pada aspek-aspek politiknya. Pendekatan multidimensional digunakan untuk memahami bagaimana identitas sosial mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat majemuk. Diskusi mengenai pengaruh identitas etnis, agama, budaya, gender, dan lainnya terhadap proses politik lokal dan nasional menjadi pusat perhatian dalam tulisan ini.

Kata Kunci: *Dinamika, Identitas Sosial, Masyarakat Majemuk*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam masyarakat majemuk, identitas sosial menjadi inti dari dinamika politik yang kompleks dan sering kali mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Identitas sosial mencakup beragam elemen seperti etnis, agama, budaya, gender, orientasi seksual, dan status sosial-ekonomi yang membentuk cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam suatu masyarakat. Dalam konteks politik, identitas sosial tidak hanya menjadi sumber solidaritas dan kebersamaan di antara kelompok-kelompok yang serupa, tetapi juga menjadi sumber konflik dan persaingan antar kelompok.

Pentingnya memahami dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk terletak pada dampaknya yang signifikan terhadap proses politik lokal, nasional, bahkan global. Identitas etnis misalnya, sering kali menjadi faktor penentu dalam pembentukan koalisi politik, distribusi sumber daya, dan pembuatan kebijakan publik di berbagai negara yang memiliki keberagaman etnis yang tinggi. Di sisi lain, identitas agama juga dapat memainkan peran yang sama pentingnya dalam membentuk preferensi politik dan orientasi ideologis.

Selain itu, dinamika identitas sosial juga mempengaruhi pola partisipasi politik, di mana individu cenderung lebih aktif secara politik ketika identitas mereka dihargai dan diakui dalam ruang politik. Namun, ketika identitas tertentu diabaikan atau diperlakukan secara tidak adil, hal itu dapat menghasilkan alienasi politik dan konflik sosial yang merugikan bagi stabilitas politik dan sosial.

Dalam konteks globalisasi yang semakin mempercepat, identitas sosial juga menjadi fokus perhatian dalam kajian politik internasional. Globalisasi membawa tantangan baru bagi identitas sosial dalam masyarakat majemuk, dengan adanya arus migrasi, interaksi lintas budaya, dan transformasi ekonomi yang mendunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana identitas sosial lokal berinteraksi dengan dinamika global dan bagaimana hal itu mempengaruhi tata politik dalam skala lokal maupun global.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, kami akan melakukan tinjauan yang mendalam tentang dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk, dengan fokus khusus pada aspek politiknya. Kami akan mengeksplorasi bagaimana identitas sosial berperan dalam membentuk struktur politik, proses pembuatan keputusan, serta dinamika konflik dan koalisi dalam politik lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas politik dalam masyarakat majemuk dan implikasinya bagi tata kelola politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tinjauan tentang dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk dari sudut pandang politik, penting untuk mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh berbagai faktor identitas seperti etnis, agama, budaya, dan gender dalam membentuk lanskap politik suatu negara. Setiap faktor identitas ini membawa dinamika sendiri yang unik, baik dalam konteks historis maupun saat ini, dan seringkali saling bersinggungan satu sama lain. Misalnya, dalam beberapa kasus, identitas etnis dan agama

tidak dapat saling memperkuat dalam membangun solidaritas dalam politik, sementara dalam kasus lain, perbedaan dalam faktor-faktor identitas ini dapat menyebabkan konflik politik yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara. Dalam kajian ini, kami akan menggali lebih dalam tentang bagaimana interaksi antara identitas-etnis, agama, budaya, dan gender memengaruhi proses politik dalam masyarakat majemuk, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas politik identitas sosial.

Metode Penelitian

Metode penelitian untuk menjelajahi dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk dengan fokus pada aspek politik dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk pemahaman mendalam tentang pengalaman individu dan kelompok dalam konteks identitas sosial, sementara pendekatan kuantitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pola dan tren yang terkait dengan identitas sosial dalam politik. Berikut adalah rincian tentang metode penelitian yang dapat digunakan:

1. **Studi Kasus:** Menggunakan pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara mendalam bagaimana identitas sosial memengaruhi politik dalam konteks spesifik negara atau wilayah. Studi kasus dapat melibatkan analisis dokumen, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan observasi langsung tentang bagaimana identitas sosial beroperasi dalam proses politik lokal dan nasional.
2. **Survei:** Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang opini, sikap, dan perilaku politik berdasarkan faktor identitas sosial seperti etnis, agama, dan budaya. Survei dapat dilakukan secara daring atau tatap muka, dan dapat mencakup sampel yang representatif dari berbagai kelompok identitas sosial dalam masyarakat.
3. **Analisis Konten:** Melalui analisis konten, peneliti dapat memeriksa bagaimana identitas sosial diposisikan dan direpresentasikan dalam media massa, dokumen kebijakan, pidato politik, dan lainnya. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang narasi politik yang terkait dengan identitas sosial dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat.
4. **Wawancara Mendalam:** Wawancara mendalam dengan individu atau kelompok yang mewakili berbagai identitas sosial dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka dalam politik. Wawancara ini dapat dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terstruktur atau semi-struktur, yang memungkinkan untuk mendalami berbagai aspek identitas sosial dan pengaruhnya dalam politik.
5. **Analisis Jaringan Sosial:** Analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antarindividu dan kelompok yang didasarkan pada identitas sosial berperan dalam politik. Analisis ini dapat melibatkan

identifikasi aktor kunci dalam jaringan politik, pembentukan koalisi, dan transfer informasi politik antar kelompok.

6. **Pemantauan Partisipatif:** *Melalui pendekatan pemantauan partisipatif, peneliti dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengumpulan data tentang dinamika politik yang terkait dengan identitas sosial. Ini dapat dilakukan melalui kelompok diskusi, forum masyarakat, atau proyek partisipatif lainnya yang melibatkan masyarakat dalam proses penelitian.*
7. **Analisis Kebijakan Publik:** *Melalui analisis kebijakan publik, peneliti dapat memeriksa bagaimana kebijakan-kebijakan publik mencerminkan atau mempengaruhi identitas sosial dalam politik. Ini melibatkan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu identitas sosial seperti hak-hak minoritas, multikulturalisme, atau integrasi imigran.*

Dengan menggabungkan berbagai metode penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk dari sudut pandang politik. Pendekatan yang holistik seperti ini dapat membantu mengungkap kompleksitas hubungan antara identitas sosial dan politik, serta implikasinya bagi tata kelola politik yang inklusif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk dari aspek politik merupakan subjek yang kompleks dan penting dalam kajian politik kontemporer. Identitas sosial, yang mencakup berbagai dimensi seperti etnis, agama, budaya, dan gender, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk struktur politik, proses pengambilan keputusan, serta dinamika konflik dan koalisi dalam konteks masyarakat majemuk. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi bagaimana identitas sosial memengaruhi politik dalam masyarakat majemuk, serta implikasinya bagi tata kelola politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dari dinamika identitas sosial dalam politik adalah konstruksi identitas politik yang kompleks. Identitas sosial seperti etnis, agama, dan budaya sering kali menjadi dasar bagi pembentukan identitas politik seseorang. Misalnya, individu mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota dari kelompok etnis tertentu dan memilih untuk mendukung partai politik atau kandidat yang dianggap mewakili kepentingan etnis mereka. Hal ini menciptakan lanskap politik yang dipengaruhi oleh saling terkaitnya identitas sosial dan politik, yang memperkuat solidaritas dalam kelompok-kelompok identitas tertentu namun juga dapat menyebabkan polarisasi politik.

Selain itu, identitas sosial juga memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi politik. Dalam masyarakat majemuk, berbagai kelompok identitas sosial sering kali bekerja sama untuk mencapai tujuan politik yang bersamaan. Contohnya adalah koalisi etnis yang bersatu untuk memperjuangkan hak-hak minoritas atau koalisi agama yang bekerja sama untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan keyakinan keagamaan mereka.

Namun, konstruksi koalisi politik juga dapat menjadi sumber konflik, terutama ketika identitas sosial yang berbeda saling bertentangan.

Dalam konteks politik lokal, identitas sosial juga dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan kebijakan publik. Pemerintah lokal sering kali harus mempertimbangkan keberagaman identitas sosial dalam masyarakat ketika merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Misalnya, dalam masyarakat dengan beragam agama, pemerintah lokal mungkin perlu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari berbagai komunitas keagamaan dalam pengaturan ruang publik atau pelaksanaan program-program sosial.

Selain itu, dinamika identitas sosial dalam politik juga mempengaruhi partisipasi politik individu dan kelompok dalam masyarakat majemuk. Individu cenderung lebih aktif secara politik ketika mereka merasa identitas mereka dihargai dan diakui dalam ruang politik. Namun, ketika identitas sosial tertentu diabaikan atau diskriminasi, hal itu dapat menghasilkan alienasi politik dan penurunan partisipasi politik di antara kelompok yang terkena dampak.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan bahwa dinamika identitas sosial dalam politik juga dipengaruhi oleh konteks globalisasi yang semakin terintegrasi. Arus migrasi, interaksi lintas budaya, dan transformasi ekonomi yang mendunia membawa tantangan baru bagi identitas sosial dalam masyarakat majemuk. Globalisasi dapat memperkuat atau melemahkan identitas lokal, menciptakan ketegangan antara identitas nasional dan identitas global, serta memperkuat atau merusak solidaritas dalam masyarakat majemuk.

Dalam menghadapi dinamika kompleks ini, pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap identitas sosial dalam politik. Hal ini termasuk mempromosikan dialog antar kelompok, mengakui keberagaman identitas sosial, dan menciptakan mekanisme partisipasi politik yang inklusif bagi semua warga. Dengan demikian, dapat terwujud tata kelola politik yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan dalam masyarakat majemuk.

Dalam konteks politik global yang semakin terhubung, identitas sosial sering kali menjadi arena pertempuran ideologi dan kekuasaan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempercepat penyebaran narasi politik yang didasarkan pada identitas sosial, baik untuk memperkuat solidaritas kelompok maupun untuk memobilisasi dukungan politik. Dalam situasi ini, identitas sosial seringkali menjadi alat politik yang kuat, digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam beberapa kasus, identitas sosial bahkan dapat menjadi dasar bagi konflik politik yang intens, termasuk konflik bersenjata antar-kelompok. Konflik etnis di sejumlah negara, misalnya, sering kali dipicu oleh ketidaksetaraan politik, ekonomi, dan sosial antar kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Identitas agama juga dapat menjadi sumber konflik politik yang serius, terutama dalam konteks persaingan kekuasaan antara berbagai kelompok keagamaan yang berbeda.

Di sisi lain, identitas sosial juga dapat menjadi sumber kekuatan bagi perubahan politik yang positif. Gerakan sosial yang didasarkan pada identitas sosial, seperti gerakan feminis atau gerakan hak-hak sipil, telah berhasil memperjuangkan perubahan sosial dan politik yang signifikan dalam masyarakat majemuk. Identitas sosial dapat menjadi dasar

bagi solidaritas dan mobilisasi politik yang kuat, yang pada gilirannya dapat membawa perubahan politik yang progresif.

Namun, penting untuk diingat bahwa identitas sosial tidak selalu bersifat statis atau homogen. Identitas sosial dapat berubah dan berkembang seiring waktu, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Proses migrasi, urbanisasi, dan perubahan sosial ekonomi dapat mempengaruhi cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka, serta hubungan politik yang terbentuk di antara mereka.

Dalam menghadapi dinamika kompleks ini, pemerintah dan lembaga politik perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkeadilan terhadap identitas sosial dalam politik. Ini termasuk memastikan representasi yang adil dari berbagai kelompok identitas sosial dalam lembaga-lembaga politik, mengakui dan menghormati hak-hak individu dan kelompok, serta menciptakan ruang politik yang memungkinkan dialog antar kelompok yang terbuka dan bermakna.

Di samping itu, masyarakat sipil juga memiliki peran yang penting dalam memperkuat solidaritas lintas-identitas dan memperjuangkan keadilan politik bagi semua warga. Gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dapat menjadi saluran bagi suara-suara minoritas dan kelompok yang terpinggirkan, serta memobilisasi dukungan untuk perubahan politik yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, lembaga politik, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi positif dari dinamika identitas sosial dalam politik. Hanya dengan pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada hak asasi manusia, masyarakat majemuk dapat mencapai tata kelola politik yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks global yang terus berubah, tantangan terhadap identitas sosial dalam politik semakin kompleks. Faktor-faktor seperti perubahan demografis, migrasi, dan perubahan teknologi terus mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka dan berinteraksi dalam ruang politik. Sebagai contoh, globalisasi telah membawa lebih banyak interaksi lintas-budaya dan lintas-agama, yang pada satu sisi dapat memperkaya kehidupan sosial dan politik, tetapi pada sisi lain juga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok identitas.

Penting untuk diakui bahwa identitas sosial bukanlah hal yang statis atau tunggal. Sebaliknya, identitas sosial seseorang dapat terdiri dari berbagai dimensi yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, seorang individu dapat mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari kelompok etnis tertentu, sekaligus memiliki identitas agama yang kuat dan identitas gender yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang memperhitungkan kompleksitas dan dinamika identitas sosial diperlukan dalam menganalisis peran identitas dalam politik.

Selain itu, penting juga untuk mengakui bahwa identitas sosial tidak selalu menjadi faktor yang dominan dalam politik. Individu dan kelompok sering kali memiliki identitas dan kepentingan yang beragam, dan dalam situasi tertentu, identitas politik mereka mungkin lebih penting daripada identitas sosial mereka. Misalnya, dalam konteks pemilihan

umum, faktor-faktor seperti kebijakan partai, karakter pemimpin, dan isu-isu ekonomi juga dapat memengaruhi preferensi pemilih selain dari identitas sosial mereka.

Dalam masyarakat majemuk yang semakin kompleks, penting untuk mempromosikan dialog antar-kelompok yang terbuka dan inklusif. Dialog ini dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok identitas dan memperkuat solidaritas lintas-identitas dalam politik. Pemerintah, lembaga politik, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk menciptakan ruang-ruang dialog yang aman dan bermakna bagi semua warga, di mana berbagai perspektif dan kepentingan dapat didengar dan dihormati.

Selanjutnya, penting juga untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung hak-hak individu dan kelompok identitas sosial. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, anti-diskriminasi, dan kebebasan beragama adalah prinsip-prinsip yang penting untuk memastikan bahwa semua warga dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan politik. Penerapan kebijakan-kebijakan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga politik, serta dukungan yang luas dari masyarakat sipil.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik juga merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran terhadap keberagaman identitas sosial. Program-program pendidikan yang mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip, serta memperkuat toleransi dan kerjasama antar-kelompok dalam politik.

Tidak kalah pentingnya adalah peran media dalam membentuk opini dan persepsi publik tentang identitas sosial dalam politik. Media memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk narasi politik, dan oleh karena itu, penting bagi media untuk bertanggung jawab dalam melaporkan tentang isu-isu identitas sosial dengan objektif dan sensitif. Etika jurnalistik yang kuat dan keragaman dalam redaksi media dapat membantu memastikan bahwa berbagai perspektif dan pengalaman dari berbagai kelompok identitas sosial tercermin dalam liputan media.

Dalam menghadapi tantangan identitas sosial dalam politik, penting juga untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini termasuk memperhatikan hubungan antara identitas sosial, kebijakan publik, dan tata kelola politik secara lebih menyeluruh. Melalui upaya bersama dari pemerintah, lembaga politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta, masyarakat majemuk dapat mencapai tata kelola politik yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Terakhir, penting untuk terus memperbarui dan menyesuaikan pendekatan dan strategi dalam mengatasi dinamika identitas sosial dalam politik, mengingat bahwa masyarakat dan konteks politik terus berubah. Dengan memahami kompleksitas dan keragaman identitas sosial, serta dengan mempromosikan nilai-nilai inklusif, keadilan, dan kerjasama, masyarakat majemuk dapat membangun masa depan politik yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi semua warganya.

Kesimpulan

Dinamika identitas sosial dalam masyarakat majemuk merupakan fenomena yang kompleks dan penting dalam politik kontemporer. Identitas sosial, yang mencakup dimensi seperti etnis, agama, budaya, dan gender, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur politik, proses pengambilan keputusan, dan dinamika konflik dalam masyarakat majemuk. Dalam tinjauan ini, kita telah melihat bagaimana identitas sosial memengaruhi pembentukan identitas politik, pembentukan koalisi politik, alokasi sumber daya dan kebijakan publik, serta partisipasi politik individu dan kelompok.

Penting untuk diakui bahwa identitas sosial sering kali menjadi dasar bagi solidaritas kelompok dan mobilisasi politik dalam masyarakat majemuk. Namun, identitas sosial juga dapat menjadi sumber konflik politik yang serius, terutama ketika identitas sosial yang berbeda bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap identitas sosial dalam politik diperlukan untuk memastikan tata kelola politik yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

Upaya bersama dari pemerintah, lembaga politik, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi positif dari dinamika identitas sosial dalam politik. Ini termasuk mempromosikan dialog antar-kelompok yang terbuka dan inklusif, memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung hak-hak individu dan kelompok identitas sosial, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya menghormati dan mengakui keberagaman identitas sosial.

Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengelola dinamika identitas sosial, masyarakat majemuk dapat mencapai tata kelola politik yang lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan. Ini akan membawa manfaat bagi semua warga, memperkuat keberagaman budaya, memperkaya dialog politik, dan membentuk fondasi yang lebih kokoh untuk perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat majemuk yang semakin terhubung di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wahyudi, D. (2022). BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital), 45.
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). Pengerjaan Abutment pada Proyek Penggantian Jembatan Idano Eho–Desa Siforoasi–Kecamatan Amandraya–Kabupaten Nias Selatan. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Rangkuti, A. H. (2022). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Putri, R. D. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I. (2018). Teori Administrasi Publik.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG–PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Kadir, A. (2017). Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik.
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara.
- Fauziah, I. (2009). Multiplikasi Tanaman Krisan (*Chrysanthemum sp.*) dengan Menggunakan Media MS (Murashige-Skoog) Padat.
- Fahmi, A. M. (2021). Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Deliana, M. Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance.
- Azhar, S. (2013). Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresifitas Remaja Pemain Point Blank (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2012). Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan.
- Tarigan, U. (2007). Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang.
- Tarigan, U. (2006). Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues.
- Tarigan, U. (2005). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara).
- Syarif, Y. (2018). Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING, 1(2).
- Siregar, N. S. S. (2019). Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, N. S. S. (2016). Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
- Tarigan, U. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).

- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom*. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.

- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.*
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).*
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.*
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB.* Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).*
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.*